



Komentar Perempuan untuk “P4R”

Kepada Yth.
Direktur Eksekutif Bank Dunia
Di- tempat

Kemiskinan bukanlah persoalan kekurangan uang semata, melainkan persoalan tidak ada atau kurangnya akses ke hak asasi manusia dan hak asasi perempuan. Karenanya, usaha untuk memerangi kemiskinan harus juga memperhatikan aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat -laki-laki dan perempuan- yang hidup di wilayah yang menjadi target. Pengabaian terhadap aspek-aspek tersebut akan membawa masalah lebih banyak kepada masyarakat, terutama perempuan yang memang sudah mengalami penindasan patriarki dan ketidakadilan gender.

Bank Dunia sedang membahas usulan sebuah mekanisme pembiayaan baru yang dinamakan “Program for Results” (P4R). Meskipun P4R memberlakukan OP /BP 4.20 Gender and Development (GAD), namun perempuan tetap akan mengalami banyak persoalan apabila kebijakan lain yang penting artinya bagi perlindungan terhadap perempuan, diabaikan.

Kami mengkhawatirkan beberapa hal berikut:

1. Tanpa perlindungan (safeguards) tidak bisa terjadi kesetaraan gender

OP/BP 4.20 GAD bertujuan mengatasi kesenjangan dan ketidaksetaraan gender melalui upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan manusia, dan efektivitas pembangunan. Padahal persoalan perempuan tidak hanya sekedar dalam hal disparitas dan ketidaksetaraan gender, melainkan juga disebabkan oleh persoalan diskriminasi dan kekerasan berbasis ras, kasta, kepercayaan, budaya, agama dan seterusnya. Tanpa ada usaha-usaha perlindungan terhadap perempuan lewat peraturan perlindungan yang ketat dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, maka usaha-usaha yang dilakukan lewat OP/BP 4.20 GAD akan tidak banyak membantu menangani kesenjangan dan ketidaksetaraan gender, malah berpotensi meningkatkan ketidak-adilan gender yang termanifestasi dalam diskriminasi, kekerasan, stereotype, beban ganda, sub-ordinasi dan marginalisasi perempuan.

Perempuan bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari masyarakat. Kehidupan perempuan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya politik dan lainnya yang dialami oleh masyarakatnya. Karenanya, kami sangat mengkhawatirkan bahwa P4R tidak menerapkan 25 OP/BP, termasuk OP/BP mengenai kajian lingkungan, masyarakat adat, hutan,

penggusuran, habitas alami yang merupakan aspek-aspek yang sangat mempengaruhi kehidupan perempuan. Kebijakan yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut penting untuk melindungi masyarakat -laki-laki dan perempuan- dari dampak, resiko dan bahaya akibat program dan proyek yang dibiayai oleh Bank. Selanjutnya, kebijakan tersebut menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengakses hak atas informasi dan mengambil keputusan mengenai pembangunan apa saja yang terjadi di tempat mereka dan mempengaruhi masa depan mereka.

Tidak berlakunya 25 OP/BP pada P4R mempunyai potensi akan semakin meningkatkan ketidakadilan gender terhadap perempuan -baik dalam bentuk melanggengkan ketidakadilan gender yang sudah ada, menambah maupun menciptakan yang baru.

Kesimpulan:

- Pengabaian terhadap pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya, membuat P4R tidak punya legitimasi untuk disetujui.
- Tidak adanya alasan untuk tidak memberlakukan 25 OP/BP tersebut secara satu per satu, menyebabkan P4R ini tidak layak untuk dijadikan sebuah mekanisme pembiayaan baru.

2. Perempuan akan makin terpinggirkan dengan tidak berlakunya OP/BP berkaitan dengan kajian lingkungan, rencana aksi lingkungan, habitat alami, hutan, masyarakat adat, sumber daya kultural fisik, penggusuran:

Beberapa potensi dampak terhadap perempuan apabila P4R mengabaikan perlindungan (safeguards) yang terkandung dalam OP/BP berkaitan dengan kajian lingkungan, rencana aksi lingkungan, habitat alami, hutan, masyarakat adat, sumber daya kultural fisik, penggusuran:

- Perempuan dan lingkungan harus dilihat secara menyeluruh, bukan terpisah-pisah. Perempuan mempunyai fungsi-fungsi sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika lingkungan dan sumber daya alam tersebut rusak akibat program-program yang tidak diperiksa kelayakan perlindungannya secara ketat, maka peran-peran sosial perempuan akan hilang, demikian juga aset pengetahuan perempuan adat.
- Perempuan adat merupakan bagian dari masyarakat adat. Pengabaian perlindungan terhadap masyarakat adat oleh P4R akan makin meminggirkan masyarakat adat, termasuk warga perempuannya.
- Dengan tidak berlakunya kebijakan mengenai penggusuran dalam P4R, maka perempuan di negara berkembang yang sekitar 60-80% hidup di wilayah pertanian akan terancam kehilangan mata pencarian dan sumber kehidupan.

Apalagi banyak perempuan kepala rumah tangga yang akan mengalami peningkatan pengabaian terhadap kepentingan mereka. Hal ini disebabkan karena perempuan tidak diakui sebagai kepala rumah tangga walaupun realitasnya jutaan perempuan di negara berkembang adalah kepala rumah tangga. Artinya, makin banyak perempuan akan tergusur dan termajinalisasi.

- Perempuan biasanya yang berperan untuk merajut jalinan sosial dan keberlanjutan budaya antara lain dengan merawat nilai-nilai religi, spiritualitas dan kultural dengan pengejawantahannya berbentuk fisik. Nilai-nilai ini tidak memiliki nilai material dan karenanya tidak bisa ditukar secara material. Pengabaian kebijakan OP/BP mengenai *physical cultural resources* akan merusak tatanan kultural masyarakat, dan meminggirkan peran-peran kultural dan sosial perempuan.

3. Potensi pelanggaran hak perempuan dan menguatnya ketidakadilan gender akan meningkat tanpa adanya monitoring dan evaluasi:

Apabila P4R tidak memberlakukan OP mengenai *Monitoring and Evaluation*, maka tidak ada evaluasi sejauh mana program yang dibiayai lewat P4R berdampak pada perempuan, baik dalam hal memberikan dampak positif maupun dalam melihat sejauh mana program tersebut justru meningkatkan ketidakadilan gender dan pelanggaran hak-hak perempuan. Tidak adanya monitoring dan evaluasi juga membuat tidak akan ada pembelajaran dan tindakan-tindakan korektif untuk program berikutnya.

Program yang tidak dimonitoring dan dievaluasi merupakan program yang tidak mempunyai transparansi dan akuntabilitas serta membuka peluang korupsi. Dengan demikian program seperti ini membahayakan kehidupan masyarakat -laki-laki dan perempuan.

4. Potensi korupsi, tidak transparan, tidak akuntabel dan pelanggaran Hak Azasi Manusia serta Hak Azasi Perempuan meningkat dengan adanya keterlibatan non-governmental parties:

Non-pemerintah tidak didefinisi secara jelas dalam P4R. Dilihat dari sini perusahaan mempunyai peluang untuk mengakses dana-dana P4R. Kontrol publik kecil terhadap perusahaan karena perlindungan oleh pemerintah dan Bank terhadap operasi-operasi perusahaan dalam hal transparansi informasi dan akuntabilitas. Dengan demikian potensi pelanggaran HAM dan HAP serta korupsi akan meningkat.

5. Potensi persetujuan program yang tidak layak akibat *Due Diligence* yang tidak jelas:

Standar perlindungan terhadap lingkungan, masyarakat adat dan penggusuran tidak diberlakukan dalam P4R. Artinya, standar 'due diligence' Bank Dunia yang tidak dipakai untuk memeriksa kelayakan usulan program untuk didanai oleh P4R. Jadi, standar apa yang digunakan sebagai *due diligence* kelayakan usulan program? Sungguh mengkhawatirkan apabila standar pemeriksaan yang digunakan adalah standar negara peminjam. Sebagai contoh: kebijakan nasional Indonesia tidak mempunyai kebijakan dan pengakuan tentang perempuan kepala rumah tangga; banyak peraturan-perundangan kebijakan dilanggar lewat praktek-praktek korupsi; beberapa peraturan perundangan saling-tumpang tindih, dan seterusnya.

Kami mengkhawatirkan bahwa program yang tidak layak secara keberlanjutan ekonomi dan sosial bagi masyarakat -laki-laki dan perempuan- serta lingkungan, bisa lolos akibat ketidak-jelasan standar yang digunakan. Selain itu tidak adanya standar *due-diligence* yang digunakan untuk memeriksa kelayakan proyek-proyek yang ada dibawah program didanai P4R, kembali akan meningkatkan potensi korupsi, perusakan lingkungan dan pelanggaran hak.

6. Penyediaan informasi, transparansi proses dan akuntabilitas

OP 9.00 tidak menjelaskan mengenai penyediaan informasi, transparansi proses persetujuan sebuah program dan akuntabilitas terhadap persoalan-persoalan yang muncul dari pembiayaan tersebut. Hal ini jelas tidak sesuai dengan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat dalam semua keputusan mengenai wilayah kehidupannya karena itu mempengaruhi kehidupan dia, keluarga dan komunitasnya.

Kesimpulan:

Memperhatikan hal-hal tersebut, kami menuntut agar P4R tidak disetujui oleh Dewan Direktur Bank Dunia. P4R membawa potensi perempuan makin dipinggirkan secara ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Indonesia, 18 Oktober 2011

TTD/Tertanda

1. Risma Umar-Solidaritas Perempuan-Nasional
2. Donna Swita-Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa-Aceh
3. Nurhidayah-Solidaritas Perempuan Jabotabek-Jakarta
4. Lulu Fuad-Solidaritas Perempuan Kahyangan Api-Bojonegoro-Jawa Timur

5. Sulhani Pratiwi-Solidaritas Perempuan Kendari-Kendari
6. ND. Ariani-Solidaritas Perempuan Kinasih-Yogyakarta
7. B. Zulhiatina-Solidaritas Perempuan Mataram-Nusa Tenggara Barat
8. Ekawati-Solidaritas Perempuan Palembang-Sumatera Selatan
9. Endang Herdiyanti-Solidaritas Perempuan Palu-Sulawesi Tengah
10. Rosmiati Sain-Solidaritas Perempuan Anging Mamiri-Makassar-Sulawesi Selatan
11. Ardhani Hatta-Solidaritas Perempuan Sumbawa-Nusa Tenggara Barat
12. Thaifa Herizal-Atjeh International Development-Aceh
13. Mila Karmila Adi-Center for Women Studies-Islamic University of Indonesia-Yogyakarta
14. Khudri Arsyad-Forum Informasi Komunikasi (FIK) Sulawesi Selatan -Makassar
15. Zohra Andi Baso-Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulsel-Makassar
16. Choirul Anam-Indonesia's NGO Coalition for International Human Rights Advocacy (HRWG)-Jakarta
17. R. Valentina Sagala-Institut Perempuan-Bandung
18. Ridwan Darmawan-Institute for Social Justice(ISOJU)-IHCS-Jakarta
19. Nurhidayat Moenir-Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)-Bogor
20. Rena Herdiyanti-Kalyanamitra-Jakarta
21. Mike Verawati-Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI)- Jakarta
22. M. Riza Damanik-Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)-Jakarta
23. Idham Arsyad-Konsorsium Pembaruan Agraria-Jakarta
24. Afrinal S. Lubis-KpSHK-Bogor
25. Ridaya Laodengkowe-Publish What You Pay Indonesia-Jakarta
26. Didi Novrian.S-Sajogyo Institute-Bogor
27. Abetnego Tarigan-Sawit Watch-Bogor
28. Lili M. Usman-Serikat Pekerja Nasional-Jakarta
29. Ahmad, SH-WALHI-Jakarta
30. Bambang Catur Nusantara-Walhi Jawa Timur-Surabaya
31. Evan Purmaga-We Can Indonesia-Jakarta
32. Kadir Wokanubun-Yayasan LBH Indonesia-Jakarta
33. Dani Setiawan-Koalisi Anti Utang-Jakarta
34. Wardarina-Individual-Jakarta
35. Marhaini Nasution-Individual-Jakarta
36. Andi Cipta Asmawati-Individual-Jakarta
37. Enday Hidayat-Individual-Jakarta
38. Aliza Yuliana-Individual-Jakarta
39. Dinda Nuurannisaa Yura-Individual-Jakarta
40. Vicky Sylvanie-Individual-Jakarta
41. Arieska Kurniawaty-Individual-Jakarta
42. David Kristian-Individual-Jakarta
43. Indriyani-Individual-Palu
44. Wahidah Rustam-Individual-Makassar
45. Aflina Mustafaina-Individual-Makassar

46. Puspa Dewy-Individual-Aceh
47. Rosmidar-Individual-Aceh
48. Hasmia Djalil-Individual-Jakarta
49. Dewi Maya Sari -Individual-Jakarta
50. Wardarina-Individual-Jakarta
51. Thaufiek Zulbahary-Individual-Jakarta
52. Anita-Individual-Jakarta
53. Sitti Munjiati-Individual-Bogor
54. Voni Iriani -Individual-Bogor
55. Syarifa -Individual-Bogor
56. Yusra A. R-Individual-Jakarta
57. Lies Dwi Artini-Individual-Jakarta
58. Murtiningsih-Individual-Bojonegoro
59. Nilna-Individual-Bojonegoro
60. Husnawati-Individual-Kendari
61. Sarifain -Individual-Kendari
62. Rahma R. Talui-Individual-Kendari
63. St. Aisyah-Individual-Kendari
64. Hartin Haris-Individual-Kendari
65. Nurhamidah-Individual-Kendari
66. Ismad Jaya-Individual-Kendari
67. Tini Sastra-Individual-Yogyakarta
68. Iwan Fathoni-Individual-Yogyakarta
69. Sagita Evi-Individual-Yogyakarta
70. Firnanda Hesti-Individual-Yogyakarta
71. Andi Susanto-Individual-Yogyakarta
72. Bonie Kertaredja-Individual-Yogyakarta
73. George Junus Aditjondro-Individual-Yogyakarta
74. Sitra Agta-Individual-Lombok Barat
75. Tanwir-Individual-Mataram
76. Ade Herlina-Individual-Padang
77. Nyimas Nur Khotimah-Individual-Palembang
78. Ida Ruri Sukmawati-Individual-Palembang
79. Fachruddin Zen-Individual-Palembang
80. Ruwaida-Individual-Palu
81. Irfan Zamzami-Individual-Semarang
82. Fathur Roziqin Fen-Individual-Kalimantan Timur
83. Melly Setyawati Mulyani-Individual-Jakarta
84. Ratna Sary-Individual-Aceh
85. Raihal Fajri-Individual-Aceh
86. FR.M. Yohanna T. Wardhani-Individual-Jakarta
87. Surayya Kamaruzzaman-Individual-Aceh
88. Wahyuddin B. Wahid -Individual-Bekasi
89. Orchida Ramadhania-Individual-Jakarta

90. Jerico Mandey-Individual-Manado
91. Faisal-Individual-Aceh
92. Hasriani-Individual-Aceh
93. Ruwaida-Individual-Aceh
94. Dina Kosa Diana-Individual-Aceh
95. Erik Zulkadam-Individual-Aceh
96. Marfini-Individual-Aceh
97. Junaidi Abdillah-Individual-Aceh
98. Della Anggraini-Individual-Aceh
99. Wanti Fitri-Individual-Aceh
100. Muhammad Reza Sahib-Individual-Jakarta
101. Zaenal Muttaqin-Individual-Jakarta
102. Abdul Halim-Individual-Jakarta
103. DD. Shineba-Individual-Jakarta
104. Iwan Nurdin-Individual-Jakarta
105. Riena Dyaningtyas Rampan-Individual-Jakarta
106. Tutik Purwaningsih-Individual-Yogyakarta
107. Herna Setiamanah-Individual-Jakarta
108. Nur Hidayat-Individual-Bandung
109. Risca Dwi Ambarsari-Individual-Jakarta